

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Ariza Tanggapi Interpelasi Formula E

### Kebon Sirih, Warta Kota

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang atau tersisa dua bulan lagi. Namun partai oposisi pemerintah daerah, yaitu Fraksi PDI Perjuangan tetap bersikeras mengajukan hak interpelasi Formula E guna meminta klarifikasi Anies soal turnamen tersebut.

Menanggapi hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa hak interpelasi adalah satu di antara beberapa hak yang dimiliki DPRD dalam mengawasi pemerintahan.

"Ya prinsipnya semua itu hak-hak yang melekat pada dewan. Kami tak akan ikut campur," ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7/2022) malam.

"Yang penting, harapan kami, hubungan baik Pemprov dan DPRD bisa makin meningkat," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan dewan untuk menjadwalkan agenda paripurna Formula E lewat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.

Sepengetahuan dia, paripurna interpelasi Formula E masih berstatus diskors karena rapat sempat tidak kuorum, sehingga penjadwalan ulang kembali masih sangat dimungkinkan.

"Kalau Pak Anies cerdas, sesegera mungkin (interpelasi) supaya tidak digantung, sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga Ibu Kota," kata Gembong, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, interpelasi perlu digaungkan untuk menjelaskan duduk perkara soal turunnya biaya Formula E. Biaya komitmen yang diprediksi hingga Rp 2,3 triliun, lalu berubah menjadi Rp 560 miliar. "Urusan interpelasi mengenai Formula E yang masih tanda tanya, misalnya kenapa begitu mahal commitment fee (sebelumnya) tapi sekarang murah. Ada apa itu? Jadi evaluasi menyeluruh sifatnya dengan kaitan penyelenggaraan Formula E," ungkapnya.

Gembong mengingatkan, duit yang dikeluarkan pemerintah daerah senilai Rp 560 miliar untuk turnamen Formula E bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Duit itu dikumpulkan dari pembayaran pajak dan retribusi masyarakat di Jakarta untuk kepentingan pelayanan.

"Karena ini dari APBD, sehingga harus dijelaskan secara transparan," ujar Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. **(m35/faf)**